

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR BATURAJA PERIODE TAHUN 2018



PT. BPR BATURAJA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
BPR BATURAJA
TAHUN LAPORAN 2018**

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *Stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industry perbankan, maka kepada BPR diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik secara berkesinambungan merupakan salah satu kunci dapat bertahannya perusahaan dalam menghadapi persaingan. Dalam dunia perbankan, Penerapan GCG bukan lagi dianggap sebagai suatu keharusan, akan tetapi merupakan kebutuhan dan faktor esensial bagi keberlanjutan Perusahaan.

II. RUANG LINGKUP TATA KELOLA PERUSAHAAN

1. PENGERTIAN UMUM

Suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip Keterbukaan (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggung jawaban (*Responsibility*), Independensi (*Independency*), dan Kewajaran (*Fairness*).

Dari pengertian atau definisi sebagaimana tersebut diatas memberikan gambaran yang jelas bahwa agar pengelola usaha BPR dapat berjalan dengan baik maka BPR wajib melaksanakan Prinsip-prinsip Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) didalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Penerapan prinsip-prinsip dasar GCG dimaksud termasuk pula pada saat penyusunan Visi, Misi, Rencana Strategis, Pelaksanaan Kebijakan dan langkah-langkah Pengawasan Internal pada seluruh jenjang organisasi

2. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

- a. Meningkatkan Kinerja BPR Baturaja
- b. Melindungi kepentingan *stakeholders* BPR Baturaja
- c. Meningkatkan kepatuhan manajemen dan karyawan BPR Baturaja terhadap peraturan perundang-undangan

3. KOMITMEN BPR BATURAJA DALAM PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

- a. BPR Baturaja telah berkomitmen untuk melakukan internalisasi prinsip-prinsip GCG kedalam kebijakan-kebijakan operasional yang berlaku. BPR Baturaja menyadari internalisasi prinsip-prinsip GCG yang lebih luas secara berkelanjutan perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi GCG di setiap aspek kegiatan BPR Baturaja.
- b. BPR Baturaja berkomitmen untuk senantiasa melakukan penyesuaian pelaksanaan GCG sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga BPR Baturaja dapat meningkatkan performa Tata Kelola Perusahaan yang baik dan memiliki daya saing tinggi.
- c. BPR Baturaja juga berkomitmen untuk terus mempraktekkan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik untuk menjadikan BPR Baturaja sebagai perusahaan yang sehat dan turut menjadi bagian dalam membangun industri perbankan di Indonesia secara umum dan khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan.

4. PRINSIP-PRINSIP YANG DITERAPKAN OLEH BPR BATURAJA

Sebagai Lembaga jasa keuangan yang menjadi kepercayaan masyarakat BPR Baturaja dalam melaksanakan kegiatan usaha perbankan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu: keterbukaan (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*responsibility*), Independensi (*Independency*), dan Kewajaran (*Fairness*).

a. Keterbukaan (*Transparency*)

- 1) Bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas dan akurat.
- 2) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi.
- 3) Kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut .

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Bank harus menetapkan tanggungjawab yang jelas dari masing-masing sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan sesuai dengan visi, misi, sasaran usaha dan tujuan perusahaan.

c. Pertanggungjawaban (*responsibility*)

- 1) Sebagai wujud pertanggungjawaban bank untuk menjaga kelangsungan usahanya, Bank harus berprinsip pada prinsip kehati-hatian.
- 2) Bank harus bertindak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Independensi (*Independency*)

- 1) Mengelola bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
- 2) Bank menghindari terjadi dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders*.
- 3) Setiap keputusan berdasarkan objektivitas serta bebas dari tekanan pihak manapun.

e. Kewajaran (*Fairness*)

- 1) Bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*)
- 2) Bank harus memberikan kesempatan kepada *stakeholders* untuk memberikan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

5. Prinsip penerapan GCG di BPR Baturaja

Prinsip penerapan GCG di BPR Baturaja Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 04/PJOK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berdasarkan pada 5 prinsip Dasar Tata Kelola Perusahaan yang meliputi: Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Akuntability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Independensi (*Independency*) dan Kewajaran (*fairness*)

III. STRUKTUR TATA KELOLA BPR BATURAJA

Struktur Tata Kelola BPR Baturaja telah merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan *Good Corporate Governance* bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan perihal Asset dan Modal Inti BPR dalam Penerapan GCG di BPR, maka dapat disampaikan data Per 31 Desember 2018, posisi aset BPR Baturaja yang beralamat di Jl. Jend A. Yani No.0828 Baturaja Timur Kabupaten OKU Sumatera Selatan adalah sebesar Rp. 49.956.443.967,- dengan Modal Inti sebesar Rp. 6.296.658.621,- Adapun struktur tata kelola BPR Baturaja Berdasarkan aset dan modal inti dapat dijabarkan sebagai berikut :

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI BPR BATURAJA

Direksi BPR Baturaja melalui RUPS tanggal 25 Juli 2016 dan berdasarkan Akta Notaris No. 174 pada Notaris H. Iqbal Amputra, S.H., M.Kn. susunan Direksi per 31 Desember 2019 ditetapkan sebagai berikut :

No	Nama Anggota Direksi	Masa Jabatan	Nomor Sertifikasi Kompetensi	Masa Berlaku S.D
1	Januar Hertanto	25 Juli 2016 s.d 25 Juli 2019	64127 1120 6 3221 2018	21 Desember 2023
2	Fitriyadi Suhendra	25 Juli 2016 s.d 25 Juli 2019	65100 1210 6 0702 2016	30 Mei 2021

Keterangan :

- a. Komposisi Direksi Tetap
- b. Tidak ada perangkapan jabatan diperusahaan / lembaga lain.

1. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

- a. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR Baturaja.
- b. Mengelola BPR Baturaja sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR.
- c. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi
- d. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan :
 - 1) Fungsi Audit Intern
 - 2) Fungsi Manajemen Risiko; dan
 - 3) Fungsi Kepatuhan
- e. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya
- f. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
 - 1) Pemisahan tugas dan tanggungjawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
 - 2) Penunjukan pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain
 - 3) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai.
 - 5) Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan komisaris.

2. DATA RIWAYAT PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA DIREKSI BPR BATURAJA

No	Nama Direksi	Usia (Thn)	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Kerja
1.	Januar Hertanto	51 Tahun	Strata 2 Magister Manajemen Universitas Bandar Lampung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Operasional PT. Bank Perkreditan Rakyat Musajaya Arthadana Lampung. 2. Direktur Operasional PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Sakai Sambayan Lampung. 3. Wakil Kepala Cabang PT. Tunas Jaya Gemilang Finance Lampung. 4. Direktur Pemasaran PD. Bank Perkreditan Rakyat Serang. 5. Direktur Utama PT. BPR Baturaja (2016 – Sekarang)
2	Fitriyadi Suhendra	55 Tahun	Strata 1 Fakultas Pertanian Sosial Ekonomi Universitas Lampung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Marketing PT. BPR Arthakurnia Cahaya Citra (1996-2004) 2. Manager BPR Amal Bhakti Sejahtera (2004-2012) 3. Unit Manager Mikro Laju (CIMB Niaga) (2012-2014) 4. Direktur BPR Binadana Makmur (2014-2016) 5. Direktur PT. BPR Baturaja (2016 – Sekarang)

3. PELATIHAN TRAINING YANG DIIKUTI DIREKSI BPR BATURAJA

Anggota Direksi BPR Baturaja telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya dengan mengikuti training/pelatihan/seminarworkshop/lokakarya/sosialisasi antara lain :

No	Nama Direksi	Jenis & Tema Pelatihan	Tahun	Lembaga
1	Januar Hertanto	Exceptional Service Training	1994	Bank PSP & Adlink
		Export Import	1999	Lembaga Manajemen Patra
		Rapid Rural Appraisal	2002	KBI Bandar Lampung
		TAX	2004	Yayasan Indonesia Baru
		Sertifikasi Profesi Direksi BPR Syariah.	2006	LSP LKM Certif
		Sertifikasi Profesi Direksi BPR.	2008	LSP LKM Certif.
		Trainer Ketentuan Perkreditan	2011	PD. BPR Serang
		UP Grading Sertifikasi Profesi Direksi BPR	2013	LSP LKM Certif
		Seminar Membangun Karakter Pemimpin Bisnis.	2014	Bank BJB Pusat
2	Fitriyadi Suhendra	Managemen BPR		LPPI/IBI
		Penanganan Kredit Bermasalah	2009	BCA
		Teknik Pengawasan Kredit dan Penanganan Kredit Bermasalah	2010	PNM
		Sertifikasi Tanah	2010	Perbarindo – BI Banten
		Sertifikasi Kompetensi Calon Pimpinan (4 Modul)	2007	Certif
		Sertifikasi Kompetensi Direktur	2011	Certif
		Sertifikasi Manajemen Risiko	2013	CIMB Niaga-Certif
		Pelatihan GCG	2015	JFI
		Sertifikasi Surveilen	2016	Certif

4. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS OLEH DIREKSI PADA TAHUN LAPORAN 2018

Direksi menindak lanjuti rekomendasi dari dewan komisaris terbukti dengan kinerja yang semakin meningkat.

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS PT. BPR BATURAJA

Dewan Komisaris BPR Baturaja Melalui RUPS tanggal 25 Juli 2016 dan berdasarkan Akta Notaris No 174 pada notaries H. Iqbal Amputra, S.H., M.Kn susunan Dewan Komisaris Per 31 Desember 2018 sebagai berikut:

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Masa Jabatan	Nomor Sertifikasi Kompetensi	Masa Berlaku S.D
1	Bhakti Perdana Dalimi	25 Juli 2016 s.d 25 Juli 2019	65100 1210 6 0373 2015	22 April 2020
2	Zainal Arifin	25 Juli 2016 s.d 25 Juli 2019	65100 12106 0621 2013	17 Juni 2018

Keterangan :

- a Jumlah Komisaris telah terpenuhi sesuai peraturan
- b Komposisi komisaris tetap

1. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

- a Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- b Melaksanakan pengawasn terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi.
- c Dalam melaksakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
- d Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan :
 - 1) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
 - 2) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan.
- e Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- f Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - 1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - 2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;

2. DATA RIWAYAT PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA DEWAN KOMISARIS BPR BATURAJA

No	Nama Direksi	Usia (Thn)	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Kerja
1	Bhakti Perdana Dalimi	39	Strata 1 Universitas Teknik Kimia Universitas Diponegoro	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisari BPR Tunas Jaya Global (2006 – 2014) 2. Komisaris BPR Tunas Jaya Graha (2007 – 2014) 3. Direktur PT Inovasi Perdana Nusantara (2008 – sekarang) 4. Komisaris PT Mitra Jasa Pratama Insurance Broker (2009 -2011) 5. Direktur Koperasi Keluarga Besar Purna Adhyaksa (2011 – 2015) 6. Komisaris BPR Hoki (2018 – sekarang) 7. Komisaris Utama BPR Baturaja (2016-sekarang).
2	Zainal Arifin	52		<ol style="list-style-type: none"> 1. Account Manager Bank Duta (1996) 2. AO Bank Mega (2000) 3. Wakil PINCA Bank Mega (2001) 4. Pimpinan CAPEM Bank Mega (2003) 5. Kabag Marketing BPR Intidana Sukses Makmur (2006) 6. Direktur Marketing BPR Intidana Sukses Makmur (2006) 7. Pejabat Eksekutif (Marketing) BPR Bina Dana Cakrawala (2008) 8. Direktur Marketing BPR Bina Dana Cakrawala (2010) 9. Direktur Utama BPR Bintang Ekonomi Sejahtera (2013) 10. Komisaris PT. BPR Baturaja (2016-sekarang)

3. PELATIHAN/TRAINING YANG PERNA DIKUTI DEWAN KOMISARIS BPR BATURAJA.

Anggota Dewan Komisaris telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya dengan mengikuti training/pelatihan/seminar/workshop antara lain :

No	Nama Dewan Komisaris	Jenis & Tema Pelatihan	Tanggal	Lembaga
1	Bhakti Perdana Dalimi	1. Sertifikasi Kompetensi Komisaris	22 April 2015	LSP LKM CERTIF
2	Zainal Arifin	1. Officer Development Program (ODP) Program Analisis Kredit	1995	Bank Duta
		2. Service Excellence Training	1996	Bank Duta
		3. Supervisory Workshop	1996	Bank Duta
		4. Kursus Pejabat Pemberi Kredit Usaha Kecil	1997	Institut Bankir Indonesia
		5. Loan Subsystem User Training	1999	Bank Duta
		6. Pelatihan Fiancial Asset Management	2000	Bank Mega dan Indovest Securities
		7. Cascading Strategic Service Inten	2000	Bank Mega
		8. Workshop Kredit	2001	Bank Mega
		9. Service Skill Marketing	2002	Bank Mega
		10. Teknik Wawancara	2003	Bank Mega
		11. Selling Skill-Training For The Bank	2004	Bank Mega & Fincon Asia
		12. Team Building	2006	BPR Intidana Sukses Makmur dan musumase Tama
		13. Pembentukan Corporate Culture	2007	BPR Intidana Sukses Makmur
		14. Pelatihan Pencegahan Kredit Bermasalah dari Perspektif Hukum	2007	Perbarindo
		15. Pelatihan Sertifikasi Profesi Direktur BPR	2007	Yayasan Perbarindo Jaya
		16. Pelatihan Kredit Mikro Bank Aceh	2009	ADB dan BPD Aceh
		17. Pelatihan Problem Solving & Decision Making	2011	PPM Manajemen

C. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS PEJABAT EKSEKUTIF

Sebagai tindak lanjut dari Penerapan Tata Kelola, kelengkapan dan pelaksanaan Fungsi Audit Intern, Fungsi Manajemen Risiko, Fungsi Kepatuhan dan APU PPT sebagai berikut :

No	Nama Pejabat Eksekutif	Jabatan	Nomor Surat Keputusan	Tanggal SK
1	Candra Budi	PE Internal Audit	No. 004/SPK.Capeg/BPR.Btrj/I/2017	13 Januari 2017
2	Feri Yanto	PE Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU PPT	No. 025/SPK.Capeg/BPR.Btrj/X/2017	05 Oktober 2017

Keterangan :

Pejabat Eksekutif BPR Baturaja telah dibentuk berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya dan tidak ada perangkapan jabatan sehingga pelaksanaan struktur tata kelola di BPR dapat berjalan efektif

1. TUGAS & TANGGUNGJAWAB PEJABAT EKSEKUTIF AUDIT INTERN, MANAJEMEN RISIKO, KEPATUHAN DAN PELAKSANA FUNGSI ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APU-PPT)

a. PEJABAT PELAKSANAAN FUNGSI AUDIT INTERN

Tugas dan Tanggungjawab dari Pejabat Pelaksana Fungsi Audit Intern sebagai berikut :

- 1) Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;
- 2) Membuat analisis dan penilaian dibidang keuangan, akutansi, operasional, dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen;
- 3) Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana; dan
- 4) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
- 5) Menyampaikan laporan kepada Direktur utama dan Dewan komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Pejabat Pelaksana Fungsi Audit Internal berasal dari pihak internal tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris. Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen

b. PEJABAT PELAKSANA FUNGSI KEPATUHAN.

Tugas dan Tanggungjawab dari Pejabat Pelaksana Fungsi Kepatuhan sebagai berikut :

- 1) Menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan
- 2) Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR
- 3) Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
- 4) Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
- 5) Memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap peraturan dan peraturan perundang-undangan lain;
- 6) Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi BPR sesuai peraturan perundang-undangan;

- 7) Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR;
- 8) Melaksanakan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR.

Pejabat Pelaksana fungsi Kepatuhan berasal dari pihak internal tidak memiliki hubungan keuangan, pengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang saham pengendali atau hubungan yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

c. PEJABAT PELAKSANA FUNGSI MANAJEMEN RISIKO

Tugas dan Tanggungjawab dari Pejabat Pelaksana Fungsi Manajemen Resiko sebagai berikut :

- 1) Pemantauan pelaksana kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Resiko yang telah disetujui oleh Direksi;
- 2) Pemantauan posisi resiko secara keseluruhan, per jenis resiko, dan per jenis aktivitas fungsional;
- 3) Pengkajian usulan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktifitas baru;
- 4) Penyampaian rekomendasi kepada satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional, sesuai kewenangan yang dimiliki; dan
- 5) Penyusunan dan penyampaian laporan profil Risiko secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko.

Pejabat Pelaksana Fungsi Manajemen Risiko berasal dari pihak internal tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan komisaris, Direksi dan/atau Pemegang saham pengendali atau hubungan yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

d. PEJABAT PELAKSANA FUNGSI ANTI PENCUCIAN UANG (APU) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (PPT).

Tugas dan Tanggungjawab dari Pejabat Pelaksana Fungsi Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) sebagai berikut :

- 1) Menganalisa secara berkala penilaian risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan Nasabahnya, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (*delivery channels*);
- 2) Menyusun, melakukan pengkinian, dan mengusulkan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT yang telah disusun untuk mengelola dan memitigasi risiko berdasarkan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada hurup 1), untuk dimintakan pertimbangan dan persetujuan Direksi;
- 3) Memastikan adanya sistem yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah;
- 4) Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang disusun sebagaimana dimaksud dalam hurub 2) telah sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang meliputi antara lain produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan, kegiatan dan kompleksitas usaha PJK, volume transaksi PJK, dan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme;
- 5) Memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan Nasabah telah mengakomodasi data yang diperlukan dalam penerapan program APU dan PPT;
- 6) Memantau rekening Nasabah dan pelaksanaan transaksi Nasabah;

- 7) Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisa transaksi Nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai;
- 8) Menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi;
- 9) Memastikan pengkinian data dan profil Nasabah serta data dan profil transaksi Nasabah;
- 10) Memastikan bahwa kegiatan usaha yang berisiko tinggi terhadap tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme diidentifikasi secara efektif sesuai dengan kebijakan dan prosedur PJK serta ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK ini;
- 11) Memastikan adanya mekanisme komunikasi yang baik dari setiap satuan kerja terkait kepada unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT dengan menjaga kerahasiaan informasi dan memperhatikan ketentuan anti *tipping-off*;
- 12) Melakukan pengawasan terkait penerapan program APU dan PPT terhadap satuan kerja terkait;
- 13) Memastikan adanya identifikasi area yang berisiko tinggi yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan sumber informasi yang memadai;
- 14) Menerima, melakukan analisis, dan menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai yang disampaikan oleh satuan kerja;
- 15) Menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai;
- 16) Memastikan seluruh kegiatan dalam rangka penerapan program APU dan PPT terlaksana dengan baik; dan
- 17) Memantau, menganalisis, dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan tentang penerapan program APU dan PPT bagi pejabat dan/atau pegawai PJK.

D. HUBUNGAN KEPENGURUSAN, KEPEMILIKAN SAHAM, HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR BATURAJA

1. HUBUNGAN KEPENGURUSAN DIREKSI DI PERUSAHAAN/GRUP USAHA BPR LAINNYA

No	Nama Direksi	Jabatan	Hubungan Kepengurusan		
			Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham
1	Januar Hertanto	Direktur Utama	Tidak ada Hubungan		
2	Fitriyadi Suhendra	Direktur			

Keterangan :

Mayoritas Anggota Direksi tidak memiliki hubungan kepengurusan dengan anggota Dewan Komisaris, anggota direksi lain dan Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank Perkreditan Rakyat Baturaja yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

2. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI BPR BATURAJA DAN PERUSAHAAN / GRUP USAHA BPR LAINNYA

Hubungan kepemilikan dan/atau pengendalian disektor jasa keuangan akan mempengaruhi kelangsungan usaha lembaga jasa keuangan yang disebabkan oleh eksposur risiko yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan usaha yang tergabung dalam suatu kelompok Grup Usaha Keuangan.

No	Nama BPR	Persentase Kepemilikan Saham Direksi
Tidak Ada		

Keterangan :

Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan kepemilikan saham dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya, pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan BPR Baturaja yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

3. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR BATURAJA

No	Nama Direksi	Jabatan	Hubungan Keuangan Dengan Pengurus dan Pemegang Saham Lain		
			Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham
1	Januar Hertanto	Direktur Utama	Tidak ada hubungan keuangan		
2	Fitriyadi Suhendra	Direktur			

Keterangan :

Mayoritas anggota direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi Lain, Pemegang saham Pengendali atau hubungan dengan BPR Baturaja yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk tidak bertindak independen

4. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR BATURAJA

No	Nama Direksi	Jabatan	Hubungan Keluarga Dengan Pengurus dan Pemegang Saham Lain		
			Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham
1	Januar Hertanto	Direktur Utama	Tidak ada hubungan Keluarga		
2	Fitriyadi Suhendra	Direktur			

Keterangan :

Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi lain, Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan BPR Baturaja yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

E. HUBUNGAN KEPENGURUSAN, KEPEMILIKAN SAHAM, HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR BATURAJA PADA :

1. HUBUNGAN KEPENGURUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DIPERUSAHAAN / GROUP USAHA BPR LAINNYA

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Hubungan Pengurusan		
			Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham
1	Bhakti Perdana Dalimi	Komisaris Utama	Tidak ada hubungan Pengurusan		
2	Zainal Arifin	Komisaris			

Keterangan :

Mayoritas anggota Dewan komisaris tidak memiliki hubungan kepengurusan dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, Pemegang saham Pengendali atau hubungan dengan BPR Baturaja yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen

2. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DI BPR BATURAJA DAN GROUP USAHA LAINNYA.

No	Nama BPR	Persentase Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris
		Tidak ada kepemilikan Saham

Keterangan :

Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan kepemilikan saham dengan anggota Direksi, anggota Komisaris lainnya, pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan BPR Baturaja yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

3. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR BATURAJA

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Hubungan Keuangan Dengan Pengurus dan Pemegang Saham Lain		
			Dewan Komisaris	Direksi lain	Pemegang Saham
1	Bhakti Perdana Dalimi	Komisaris Utama	Tidak ada hubungan Keuangan		
2	Zainal Arifin	Komisaris			

Keterangan :

Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, Pemegang saham Pengendali atau hubungan dengan BPR Baturaja yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

4. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR BATURAJA

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Hubungan Keluarga Sampai Derajat KEDUA		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Direksi	Pemegang Saham
1	Bhakti Perdana Dalimi	Komisaris Utama	Tidak ada hubungan Keluarga		
2	Zainal Arifin	Komisaris			

Keterangan :

Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris lain, Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan BPR Baturaja yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

F. PAKET / KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS BPR BATURAJA PADA TAHUN LAPORAN 2018.

No	Jenis Remunerasi & Fasilitas Lain	Jumlah yang diterima Selama 1 (Satu) Tahun			
		Dewan Komisaris		Direksi	
		Jumlah Orang	Nominal (Rp.)	Jumlah Orang	Nominal (Rp.)
1	Jumlah keseluruhan gaji	2	219.930.014,-	2	550.678.780,-
2	Tunjangan	0	0	2	247.200.200,-
3	Tunjangan Hari Raya (THR)	2	17.280.000,-	2	43.100.000,-
4	Kompensasi berbasis saham				
5	Remunerasi bagi pengurus BPR Baturaja yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggungjawab, dan resiko dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris				
6	Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan	2	1. Sewa Rumah Kos 2. Asuransi Kesehatan	2	1. Sewa Rumah Kos 2. Asuransi Kesehatan 3. Kendaraan Dinas Operasional

G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH DI BPR BATURAJA PADA TAHUN LAPORAN 2018

1. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah.

No	Uraian	Rasio
1	Rasio Gaji Pegawai Tertinggi dan Terendah	0,35
2	Rasio Gaji Direksi Tertinggi dan Terendah	0,80
3	Rasio Gaji Komisaris Tertinggi dan Terendah	0,80
4	Rasio Gaji Direksi Tertinggi dan Komisaris Tertinggi	2,51
5	Rasio Gaji Direksi Tertinggi dan Pegawai Tertinggi	3,12

2. Daftar Gaji Tertinggi dan Terendah

No	Uraian	Gaji per bulan	
		Tertinggi (Rp.)	Terendah (Rp.)
1	Rasio Gaji Pegawai Tertinggi dan Terendah	8.175.000,-	2.870.163,-
2	Rasio Gaji Direksi Tertinggi dan Terendah	25.499.480,-	20.391.720,-
3	Rasio Gaji Komisaris Tertinggi dan Terendah	10.168.920,-	8.159.232,-
4	Rasio Gaji Direksi Tertinggi dan Komisaris Tertinggi	25.499.480,-	10.168.920,-
5	Rasio Gaji Direksi Tertinggi dan Pegawai Tertinggi	25.499.480,-	8.175.000,-

Keterangan :

Gaji yang diperbandingkan dengan rasio gaji termaksud diatas, adalah imbalan yang diterima oleh anggota Dewan komisaris, anggota Direksi pegawai per bulan. Yang dimaksud dengan pegawai adalah pegawai tetap BPR Baturaja sampai batas pelaksana. Kriteria gaji pegawai yang dimasukkan sebagai pembanding adalah pegawai tetap.

H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS BPR BATURAJA PADA TAHUN 2018

1. Data Kehadiran Anggota Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris :

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
1	Bhakti Perdana Dalimi	Komisaris Utama	4	4	100%
2	Zainal Arifin	Komisaris	4	4	100%

2. Materi Rapat Dewan Komisaris pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No.	Topik Rapat	Tanggal	Peserta Rapat
1	Evaluasi Kinerja BPR selama tahun 2017	22 Januari 2018	2 Orang
2	Pembahasan Rencana Bisnis Bank tahun 2018	19 Februari 2018	2 Orang
3	Laporan Keuangan Tahunan untuk RUPS	26 Maret 2018	2 Orang
4	Evaluasi Kinerja Semester Pertama tahun 2018	08 Oktober 2018	2 Orang

I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN (INTERNAL FRAUD) DI BPR BATURAJA PADA TAHUN LAPORAN 2018.

No	Internal Fraud 1 (Satu) Tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh			
		Dewan Komisaris	Direksi	Pegawai Tetap	Pegawai Tidak Tetap
1	Total Fraud	Tidak ada penyimpangan			
2	Telah diselesaikan				
3	Dalam Proses Penyelesaian di Internal BPR				
4	Belum diupayakan penyelesaiannya				
5	Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum				

Keterangan:

Selama tahun 2018, tidak terdapat penyimpangan internal dan permasalahan hukum yang dilakukan oleh Dewan komisaris, Direksi, Pegawai Tetap dan pegawai tidak tetap di BPR Baturaja

J. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DI BPR BATURAJA PADA TAHUN LAPORAN 2018

No	Permasalahahan Hukum	Jumlah	
		Perdata	Pidana
Telah selesai (Telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)			
1	Rp. 1 juta s.d Rp. 25 juta	Tidak ada permasalahan hukum	
2	Diatas Rp. 25 juta		
Dalam proses penyelesaian			
1	Rp. 1 juta s.d Rp. 25 juta	Tidak ada permasalahan hukum	
2	Diatas Rp. 25 juta		
	Total		

Keterangan :

Selama tahun 2018, tidak terdapat permasalahan hukum di BPR Baturaja.

K. TRANSAKSI YANG MEMILIKI BENTURAN KEPENTINGAN DI BPR BATURAJA PADA TAHUN LAPORAN 2018.

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan BPR Baturaja atau mengurangi keuntungan BPR dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

Table transaksi Pengurus dan pejabat yang memiliki benturan kepentingan di BPR Baturaja tahun 2018 :

No	Nama & Jabatan yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama & Pejabat Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Rp. 000)	Ket.
1	Januar Hertanto (Direktur Utama)	Fitriyadi Suhendra (Direktur)	Pinjaman Kredit	160.000,-	-
2	Fitriyadi Suhendra (Direktur)	Januar Hertanto (Direktur Utama)	Pinjaman Kredit	145.000,-	-
3	Candra Budi (PE SPI)	Januar Hertanto (Direktur Utama)	Pinjaman Kredit	280.000,-	
4	Rahma Delawati (Kepala Bagian	Januar Hertanto	Pinjaman	280.000,-	

	Operasional)	(Direktur Utama)	Kredit		
5	Bhakti Perdana Dalimi (Komisaris Utama)	Januar Hertanto (Direktur Utama)	Pinjaman Kredit	400.000,-	
6	Dani Hariansyah (Kepala Bagian Kredit)	Januar Hertanto (Direktur Utama)	Pinjaman Kredit	6.200,-	

Keterangan :

Dalam tahun 2018, terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yakni Pinjaman Kredit Direktur Utama dan Direktur.

L. AUDIT EKSTERNAL

Laporan Keuangan BPR Baturaja selama tahun 2018 belum diaudit oleh akuntan publik.

No	Tahun	Nama Kantor Akuntan Publik	Nomor Perjanjian Kerja	Masa Laku Perjanjian	Terdaftar di OJK
1.	2018	KAP Drs. Henry & Sugeng	SPK01/GA/2018/I/17/PST	30 Hari	Terdaftar

M. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK) PADA TAHUN LAPORAN 2018

Selama tahun laporan 2018, tidak ada pelampauan maupun pelanggaran terhadap batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), baik kepada pihak terkait, maupun kepada kelompok usaha.

N. RENCANA BISNIS BANK

1. Rencana Bisnis BPR Baturaja tahun 2018 telah disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan cakupan yang disesuaikan dengan kegiatan usaha dan kompleksitas usaha BPR
2. Penyusunan Rencana Bisnis BPR Baturaja tahun 2018 telah memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi operasional dan perkembangan usaha BPR ke depan
3. Rencana Bisnis BPR Baturaja tahun 2018 telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
4. Rencana Bisnis BPR Baturaja telah disusun realistis sehingga dapat direalisasikan dengan baik, efisien, dan efektif

O. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

1. Laporan Keuangan Publikasi Keuangan Triwulan ditempel dipapan ruang Banking Hall.
2. Transparansi Informasi Produk lewat Brosur, Spanduk, Website www.bprbaturaja.co.id dan sarana promosi lainnya.
3. Pelayanan keluhan dan pengaduan nasabah terkait pelayanan di BPR Baturaja.
4. Pelaporan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk laporan pengaduan nasabah.
5. Publikasi Produk BPR dengan brosur dan mengikuti kegiatan promosi lainnya

P. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK PADA TAHUN LAPORAN 2018

Secara garis besar, program kegiatan sosial BPR Baturaja selama tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No	Nama Penerima	Jumlah (Rp.)	Tanggal	Tujuan Penggunaan
1.	Kecamatan Baturaja Barat	500.000,-	9 Maret 2018	Acara MTQ Kec. Baturaja Barat
2.	Pemkab Ogan Komering Ulu	500.000,-	10 Agustus 2018	Konsumsi Sholat Shubuh Berjamaah
3.	Dinas Pendidikan Kab. OKU	1.000.000,-	27 September 2018	Bantuan untuk Masjid di Dinas Pendidikan

LAPORAN HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR BATURAJA PADA TAHUN LAPORAN 2018.

No	KRITERIA/INDIKATOR	SKALA PENERAPAN				
		STRUKTUR	PROSES	HASIL	S+P+H	NILAI BOBOT FAKTOR
1	Pelaksanaan Tugas dan tanggung Jawab Direksi	0,50	0,60	0,25	1,35	0,27
2	Pelaksanaan Tugas dan tanggung Jawab Dewan Komisaris	0,50	0,55	0,22	1,27	0,19
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi komite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2,00	1,60	0,40	4,00	0,40
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	0,50	0,88	0,18	1,56	0,16
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	0,80	1,00	0,19	1,99	0,20
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	0,50	0,40	0,03	0,93	0,02
8	Penerapan Manajemen Resiko	1,00	1,89	0,31	3,20	0,32
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	0,50	1,60	0,19	2,29	0,17
10	Rencana Bisnis	0,50	0,40	0,08	0,98	0,07
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	0,50	1,00	0,14	1,64	0,12
Nilai Komposit						1,93

Kesimpulan hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola PT. BPR Baturaja

Nilai Komposit	Predikat Komposit
1,93	Baik


ANALISIS

- 1 Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola PT. BPR Baturaja berdasarkan penilaian telah lengkap sesuai ketentuan.
- 2 Proses penerapan Tata Kelola PT. BPR Baturaja berdasarkan penilaian telah berjalan cukup efisien dan efektif yang didukung oleh struktur organisasi Tata Kelola yang cukup lengkap.
- 3 Hasil Penerapan Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian telah cukup efektif dengan didukung oleh struktur yang cukup lengkap

Baturaja, 04 April 2019


Januar Hertanto
Direktur Utama

Mengetahui


Bhakti Perdana Dalimi
Komisaris Utama